



INDONESIA DITUDING PRAKTEKKAN KERJA PAKSA

Bahlil: Jangan Pro Asing Kamu!

Jakarta, MIMBAR - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada indikasi kerja paksa dalam hilirisasi nikel dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tuduhan dari Amerika Serikat (AS) yang mengklaim

■ Bersambung ke Hal 11



Kurikulum Merdeka Disoal

Jakarta, MIMBAR - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik penerapan kebijakan kurikulum merdeka secara nasional. Ia berpendapat kurikulum merdeka hanya cocok diterapkan di beberapa sekolah saja. "Saya bicara bahwa kurikulum merdeka itu tidak cocok secara nasional. Bisa dilaksanakan terbatas satu sekolah,

■ Bersambung ke Hal 11

KETUA MAJELIS PTUN JAKARTA SAKIT

Putusan Keabsahan Cawapres Gibran Ditunda



Jakarta, MIMBAR - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP melawan KPU RI terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

■ Bersambung ke Hal 11



Asalkan Tetap Independen

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara menyusul penundaan sidang putusan PTUN soal gugatan untuk mencabut penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Ketua DPP PDIP Bidang

Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy berharap putusan majelis hakim bisa berpegang pada tiga hal yakni, keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan. "Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan

■ Bersambung ke Hal 11

KASUS PENIPUAN RP210 TRILIUN, BURONAN INTERPOL ASAL CHINA DITANGKAP :

Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) menangkap seorang buron internasional asal China yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol. Buron tersebut dikenal dengan berinisial LQ alias JL (Joe Lin). LQ dituduh secara ilegal mengumpulkan lebih dari 100 miliar yuan China (sekitar Rp 210 triliun). Pengumpulan uang tersebut berasal lebih dari 50.000 orang dengan janji palsu mengenai pembayaran pokok dan bunga serta pengembalian tahunan yang tinggi, berkisar antara 6 persen hingga 10,1 persen. LQ alias Joe Lin ditangkap berdasarkan red notice dan perintah penangkapan dari Shanghai Public Security. (Foto Liputan6.com)

PREDIKSI BAWASLU DI PILKADA 2024

Bansos Rawan Dipolitisasi Calon Kepala Daerah

Medan, MIMBAR - Masa kampanye Pilkada Serentak 2024 memiliki kerawanan dalam bentuk politisasi bantuan sosial (bansos) sembako.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan, politisasi bansos oleh calon kepala daerah (cakada) masuk kategori pelanggaran politik uang jika dilakukan.

"Misalnya pembagian sembako atau pembagian uang," kata Totok dalam keterangan tertulis di laman bawaslu.go.id, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dia memaparkan, jenis pelanggaran politik uang telah diidentifikasi lama oleh Bawaslu, dan masuk ke dalam peta kerawanan pemilihan yang diluncurkan

pada Agustus 2024 lalu. "Potensi kerawanan tersebut berdasarkan kajian dan riset Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) Serentak 2024 yang diluncurkan pada 2022 lalu," katanya.

"Salah satu parameter kerawannya, berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu," demikian Totok. (rm/js)

LUAR NEGERI

Iran Siap Tembakkan Ribuan Rudal ke Israel

Medan, MIMBAR - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan negaranya siap melancarkan serangan rudal yang lebih besar lagi terhadap Israel dibandingkan pekan lalu.

Penasihat Komandan Kepala IRGC Hossein Salami, Ebrahim Jabbari, bahkan bersumpah Iran berani menembakkan ribuan rudal ke Israel jika menerima serangan balasan.

"Jika kami meluncurkan 200 di sana, sekarang kami siap untuk menghujani ratusan atau ribuan rudal ke wilayah yang mereka duduki dan menyerang pusat-pusat keamanan, militer, dan ekonomi mereka," kata Jabbari.

Salami juga menyepelekan Israel yang menurutnya secara geografis kecil

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat
7 RABIUL AKHIR 1446 H
Subuh : 04:56 WIB
Zuhur : 12:16 WIB
Ashar : 15:29 WIB
Maghrib : 18:17 WIB
Isya : 19:25 WIB
■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Ketidakpastian Gibran

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



HEADLINE Berita Koran Mimbar Umum hari ini mengangkat isu penting terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Penundaan pembacaan putusan oleh PTUN Jakarta, karena ketua majelis yang sakit, menambah ketidakpastian menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20

Oktober 2024.

Gugatan PDIP terhadap KPU menggarisbawahi kekhawatiran mengenai prosedur hukum dalam pencalonan, dan ada potensi implikasi serius jika gugatan tersebut dikabulkan. Meskipun Gayus Lumbuun dari PDIP menyatakan bahwa pelantikan

■ Bersambung ke Hal 11

Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran

ADA 46 KEMENTERIAN



SUSUNAN kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming disebut-sebut berjumlah 46 kementerian.

"Ada 46 kementerian," kata sumber CNNIndonesia dari Lingkaran Istana, Kamis (10/10).

Sejumlah nama beredar sebagai sosok potensial akan mengisi kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Mereka berasal dari partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prabowo melemparkan kode bakal banyak menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali menjabat di kabinetnya.

■ Bersambung ke Hal 11

Semoga cepat sembuh ya pak hakim ...
Aamiin..

Kurikulum Merdeka...

Dari Halaman 1

dua sekolah,” kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

JK juga menyoroti penghapusan sistem peringkat di kelas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya juang peserta didik berkurang.

Ia membandingkan cara mendidik antara dulu dengan kini. JK menyebut ketegasan juga diperlukan di dunia pendidikan.

“Pendidikan ini reward and punishment, kalau hanya semua reward tidak akan pernah terjadi disiplin,” ucap dia.

JK mencontohkan sistem pendidikan di Finlandia yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan diri sesuai minatnya.

“Finland satu kelas cuman 16 dia boleh hari ini main kimia ada labnya, hari

ini fisika ada labnya, mau musik ada bandnya, mau olahraga ada tamannya,” ujarnya.

Sebelumnya JK juga mengkritik sosok Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menurut JK, Nadiem selama ini jarang datang langsung ke daerah dan masuk kantor.

“Ini kementerian, (namanya) sekarang panjang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, luas sekali, banyak sekali, dipimpin orang yang jarang ke kantor,” ujar JK awal September lalu.

“Minta maaf ya, karena saya minta ketemu tapi ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang ke depan jangan begitu pilih menteri. Karena bagaimana, berapa puluh anggaran dikasih kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi,” imbuhnya. (cnni/js)

Ada 46...

Dari Halaman 1

“Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang,” kata Prabowo di acara BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo menyebut proses transisi pemerintahan dari Jokowi berjalan lancar. Ia merasa Jokowi sangat membantunya dalam proses transisi menjelang 20 Oktober.

Berikut ini daftar 46 kementerian di kabinet Prabowo-Gibran:

1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko Ekonomi
3. Kemenko PMK
4. Kemenko Marinives
5. Kemenko Kemasyarakatan
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian PAN-RB
11. Kementerian ATR/BPN
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Hutan
14. Kementerian Laut dan Perikanan
15. Kementerian Pekerjaan Umum
16. Kementerian Perumahan Rakyat
17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Desa PDT

19. Kementerian Transmigrasi

20. Kementerian Perdagangan

21. Kementerian BUMN

22. Kementerian Koperasi

23. Kementerian Perindustrian

24. Kementerian Pariwisata

25. Kementerian Ekonomi Kreatif

26. Kementerian UMKM

27. Kementerian Agama

28. Kementerian Sosial

29. Kementerian PPPA

30. Kementerian Kesehatan

31. Kementerian Ketenagakerjaan

32. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

33. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

34. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi

35. Kementerian Pendidikan Tinggi

36. Kementerian Kebudayaan

37. Kementerian Pemuda dan Olahraga

38. Kementerian Keuangan

39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

40. Kementerian ESDM

41. Kementerian Lingkungan Hidup

42. Kementerian Investasi

43. Kementerian Hukum

44. Kementerian HAM

45. Kementerian Sekretariat Negara

46. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

(cnni/js)



DATANGI GEDUNG KKP, KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN TOLAK KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT :

Masyarakat dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis, (10/10/2024). Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintahan Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tetap menjalankan ekspor pasir laut. Pembukaan kembali kebijakan ekspor pasir laut bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan biota laut. (Foto Liputan6.com)

Bahlil: Jangan...

Dari Halaman 1

adanya praktik kerja paksa di sektor hilirisasi nikel Indonesia yang menjadi andalan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Gak ada dong, saya kan Mantan Menteri Investasi. mana ada sih kerja paksa,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (7/10) malam. Bahlil pun mengimbau agar wartawan Indonesia memberitakan informasi berdasarkan fakta dan tidak terpengaruh persepsi negatif asing.

Ia menekankan pentingnya menjaga reputasi nasional dan tidak terpengaruh oleh tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.

“Ya jangan pakai katanya, jangan pro asing kamu! Harus memberitakan sesuatu yang fakta,

jangan persepsi negatif bagi bangsa kita, kita beritakan. Gak ada. Sayangnya negara kalian lah, kita kan punya nasionalisme dong,” tegasnya.

Sejatinya, tuduhan mengenai ‘kerja paksa’ dalam hilirisasi nikel di Indonesia ditulis dalam laporan ‘Global State of Child and Forced Labour’ yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada 5 September 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) menduga ada kerja paksa di industri nikel Indonesia. Berdasarkan laporan itu, para korban kerja paksa merupakan warga negara asing (WNA) China. Mereka dipaksa bekerja di pabrik smelter nikel di Tanah Air. “Kerja paksa mencemari rantai pasokan

mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari Kongo,” kata Deputi Wakil Menteri Ketenagakerjaan AS Thea Lee.

Industri nikel Indonesia berpusat di Pulau Sulawesi. Kepemilikan pabrik smelternya didominasi oleh perusahaan-perusahaan China.

Ia menyebut para pekerja migran asal China itu menghadapi berbagai pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

“Misalnya, lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, keselamatan kerja tak memadai, upah yang tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang,” imbuhnya. (cnni/js)

Asalkan Tetap...

Dari Halaman 1

tersebut. Pihaknya hanya meminta agar hakim tetap independen.

“Jadi, kalau pun penundaannya sampai dua minggu, tidak ada masalah asal majelis hakimnya tetap independen dan berpegang kepada 3 unsur yang saya sebutkan dalam mengambil keputusan tersebut,” katanya.

Putusan sidang perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT seyogyanya dibacakan secara elektronik melalui e-court pada hari ini. Sidang perkara ini sudah berlangsung empat bulan lebih dengan sidang perdana pada

Kamis, 30 Mei 2024.

Dalam pokok perkara, PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal Keputusan KPU dimaksud. Selain itu, majelis hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali Keputusan KPU 360/2024.

“Putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober disebabkan Ketua Majelis sakit,” ujar Gayus Lumbuun selaku kuasa hukum pemohon saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (10/10). (cnni/js)

Putusan Keabsahan...

Dari Halaman 1

pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menilai, KPU melakukan pelanggaran dengan menerbitkan PKPU yang menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Pada hal, PKPU itu tidak dibahas lebih dahulu dengan Komisi II DPR RI sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Perundang-Undangan.

TAK UBAH KETETAPAN

Namun, gugatan PDIP atas KPU ke PTUN, Jakarta ini, tidak akan mengubah ketetapan hasil Pemilu 2024, yang menetapkan duet Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Namun, Gayus berpandangan, Gibran bisa batal dilantik sebagai wakil presiden, jika gugatan yang mereka ajukan ke PTUN Jakarta, dikabulkan.

“Yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami, ya tidak bisa dilantik. Bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik orang bermasalah,” kata Gayus ketika ditemui di PTUN Jakarta, 18 Juli 2024 lalu.

NON-EXECUTABLE

Iran Siap...

Dari Halaman 1

Jazeera.

Israel disebut sedang merancang skenario untuk membalas serangan, usai Iran meluncurkan lebih dari 200 rudal ke negara Zionis itu pada Selasa (1/10) lalu.

Sejumlah sumber melaporkan Israel akan menyerang setelah peringatan serangan dadakan Hamas 7 Oktober. Namun, hingga kini tak ada waktu pasti soal balasan Tel Aviv.

Beberapa pengamat memprediksi Israel akan membalas dengan menyerang situs nuklir hingga kilang minyak Iran.

Amerika Serikat juga telah menegaskan

bahwa akan bekerja sama dengan Israel untuk mengeksekusi serangan balasan tersebut.

Radio Angkatan Darat Israel dan surat kabar negara Zionis itu, Haaretz, melaporkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah membicarakan serangan balasan ke Iran dengan matang.

Gallant menuntaskan respons Israel terhadap serangan rudal Iran pekan lalu “akan memantapkan, tepat, dan yang terpenting mengejutkan.”

“Mereka (Iran) tidak akan mengerti apa yang terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi,” ucap Gallant. (cnni/js)

Hidayah



Ketidakpastian Gibran

Dari Halaman 1

Prabowo tetap akan berlangsung, ketidakpastian seputar Gibran bisa memengaruhi stabilitas politik.

Situasi ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pemilu dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pelantikan pejabat baru. Diharapkan, semua pihak dapat menunggu hasil putusan yang jelas untuk memastikan proses politik berjalan lancar.

Dalam sistem peradilan, jika ketua majelis PTUN sakit, biasanya ada prosedur untuk menunjuk hakim pengganti atau wakil agar sidang dapat dilanjutkan. Namun, keputusan untuk mengganti ketua majelis atau melanjutkan sidang tergantung pada kebijakan dan aturan internal PTUN serta kondisi kesehatan ketua majelis tersebut.

Jika tidak ada pengganti yang ditunjuk dan penundaan tidak dapat dihindari, maka sidang akan ditunda sampai ketua majelis pulih atau sampai ada keputusan lain dari lembaga. Proses hukum seharusnya tetap berjalan dengan prinsip keadilan

dan efisiensi, sehingga keputusan yang diambil tetap valid dan sah.

Sakitnya ketua majelis hakim PTUN dalam perkara gugatan terhadap Gibran mungkin bisa dianggap sebagai faktor kebetulan, tetapi situasi ini juga memicu berbagai spekulasi dan perhatian publik. Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Pertama sakitnya ketua Majelis Hakim bisa jadi disebabkan oleh masalah kesehatan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditangani.

Kedua ketidakpastian tentang kelanjutan sidang bisa memicu spekulasi di kalangan masyarakat dan media tentang potensi pengaruh politik atau tekanan yang mungkin ada.

Selanjutnya, penundaan ini dapat dilihat sebagai bagian dari proses hukum yang wajar. Dalam hal ini, kesehatan hakim adalah hal yang harus diperhatikan demi keadilan.

Meskipun ada banyak spekulasi, penting untuk menunggu informasi resmi mengenai kondisi Ketua Majelis dan kelanjutan sidang untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. ***

yang tidak bisa dipisahkan ketika majelis hakim membuat putusan,” kata Ronny saat dihubungi, Kamis (10/10).

Sidang putusan itu ditunda selama dua pekan karena majelis hakim sakit. Ronny mendoakan agar majelis hakim segera pulih. Dia meyakini gugatan partainya memiliki fakta-fakta hukum yang kuat.

Ronny mengaku tak mempermalahkan penundaan hingga dua pekan sidang putusan

KETUA MAJELIS SAKIT

Laman sindonews mengutip jurubicara PTUN Jakarta, Irwan Mawardi, mengatakan, Kamis, “Pak Joko Setiono selaku ketua majelisnya dalam kondisi sakit sehingga pembacaan putusan ditunda.”

Tidak ada penjelasan mengenai kondisi sakit Joko, serta sudah berapa lama sakit. Gayus juga mengatakan, penundaan sidang lantaran ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sedang dalam kondisi sakit. “Disebabkan ketua majelis sakit,” ucap dia.

GUGATAN

PDIP melayangkan gugatan yang teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN. JKT itu karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima

dibandingkan dengan Iran. Ia mewanti-wanti Israel harus berhati-hati terhadap dampak dari serangan balasan Iran.

“Kami adalah negara yang luas. Kami telah menciptakan kemampuan untuk menyerang dari titik lain di negara ini jika salah satu titik kami terkena. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Amerika Serikat tidak akan berani bertempur dengan kami, tapi kami bisa dengan cepat meluluhlantakkan wilayah kecil itu,” kata Jabbari merujuk pada Israel seperti dikutip Al